

## **Nono Sampono: Moratorium Perizinan Tangkap Ikan Antara Manfaat dan Petaka**

**Jakarta-senayan (21/11)** – Anggota Komite I DPD RI, Nono Sampono menganggap bahwa moratorium Perizinan tangkap ikan diberlakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 tahun 2014 dan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia secara nyata di lapangan membawa manfaat dan juga sebagai malapetaka.

“Moratorium Perizinan Tangkap Ikan oleh KKP, saya pikir selain membawa manfaat juga membawa malapetaka.” Ujar alumnus Program Doktor Ilmu Kelautan dan Perikanan IPB ini di kantornya senayan.

Mantan Komandan Korps Marinir ini juga menjelaskan bahwa manfaat dari moratorium perizinan tangkap ikan oleh KKP bisa mengurangi illegal fishing, pemulihan sumber daya ikan yang sudah terkuras, perbaikan lingkungan yang rusak, dan memantau kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan. Selain itu, Moratorium ini juga dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kehidupan nelayan, serta memberi kesempatan kepada pengusaha dengan kapal lokal untuk lebih banyak mendapatkan manfaat.

“Bila kita cermati, moratorium ini secara jelas membawa manfaat dalam upaya penanggulangan illegal fishing, memulihkan sumber daya ikan dan perbaikan lingkungan laut yang rusak, menertibkan para pelaku usaha penangkapan ikan serta meningkatkan taraf hidup nelayan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pengusaha kapal lokal dan nelayan.” Tegaskan Nono Sampono di sela-sela wawancara.

Lebih lanjut senator Indonesia asal Provinsi Maluku ini memaparkan malapetaka dari moratorium perizinan tangkap ikan adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan-karyawan perusahaan tangkap ikan yang gulung tikar akibat kebijakan tersebut. selain itu, juga membawa dampak penurunan pemasukan pajak kepada kas negara.

“Malapetaka dari kebijakan moratorium oleh KKP, menimbulkan pengangguran yang cukup banyak akibat PHK yang dilakukan perusahaan-perusahaan tangkap ikan yang gulung tikar, selain itu sudah pasti akan menurunnya pemasukan pajak ke kas negara dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, jika masih diberlakukan moratorium setidaknya ada kebijakan memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan tangkap ikan secara ketat dan terpilih” Demikian Nono Sampono menutup wawancara.

**Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. Nono Sampono, M.Si**

**Ketua Kaukus DPD RI Indonesia Timur dan Anggota DPD RI Dapil Maluku 2014-2019; Mantan Komandan Korps Marinir TNI AL; Mantan Kepala Basarnas RI; Alumni Doktor Ilmu Kelautan dan Perikanan IPB**

